

**POLITIK POPULISME DALAM PEMBENTUKAN AMANDEMEN UU
KEWARGANEGARAAN INDIA 2019**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

WIDIYA SEKAR SARI

18323046

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

POLITIK POPULISME DALAM PEMBENTUKAN AMANDEMEN UU

KEWARGANEGARAAN INDIA 2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

WIDIYA SEKAR SARI

18323046

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**POLITIK POPULISME DALAM PEMBENTUKAN AMANDEMEN UU
KEWARGANEGARAAN INDIA 2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

23 Juli 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Program Studi

[Handwritten Signature]
Rahmi Rahmi Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

[Handwritten Signatures]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

23 Juli 2025



Widiya Sekar Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Konsep.....	9
1.7 Argumen Sementara	11
1.8 Metode Penelitian.....	12
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>12</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>12</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>12</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian.....</i>	<i>12</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2 FAKTOR IDENTITAS DALAM KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI DAN AMANDEMEN UU KEWARGANEGARAAN INDIA 2019 ...	15
2.1 Politik Identitas dalam Kepemimpinan Narendra Modi	15
2.2 Kebijakan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019	20
BAB 3 PENGARUH POPULISME TERHADAP AMANDEMEN UU KEWARGANEGARAAN INDIA 2019	26
3.1 Mobilisasi Politik oleh Pemerintah India.....	26
3.2 Retorika Populis dalam CAA 2019.....	30
3.3 Hindutva sebagai Proyek Politik yang Direalisasikan dalam Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019	32
BAB 4 PENUTUP.....	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Rekomendasi.....	36

DAFTAR PUSTAKA 38

DAFTAR SINGKATAN

AASU	: All Assam Students' Union
AGP	: Asom Gana Parishad
AIADMK	: All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
BJP	: Bharatiya Janata Party
CAA	: Citizenship Amendment Act
M	: Miliar
NESO	: North East Students' Organization
NGO	: Non-Governmental Organization
NH	: National Highway
NRC	: National Register of Citizens
OBC	: Other Backward Caste
PMK	: Pattali Makkal Katchi
RSS	: Rashtriya Swayamsevak Sangh
RUU	: Rancangan Undang-undang
SDF	: Sikkim Democratic Front
TDP	: Telugu Desam Party
TMC	: Trinamool Congress
UU	: Undang-undang
YSR-CP	: Yuvajana Sramika Rythu Congress Party

ABSTRAK

Untuk mengurangi banyaknya imigran ilegal yang masuk ke India dari berbagai macam agama dan negara, maka pada tahun 2019 di bawah pemerintahan Narendra Modi telah resmi disahkannya *The Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019* atau juga dikenal sebagai Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019. Mobilisasi Hindu untuk tidak percaya lagi dengan Muslim dan menempatkan Muslim sebagai ancaman sambil memainkan retorika populis anti Muslim. Ketika kedua aspek ini digabungkan maka akan mendapatkan gambaran bahwa Hindutva menjadi proyek politik yang berkelanjutan selama masa pemerintahannya. Mobilisasi Hindu ini dibangun secara pelan-pelan oleh aktor politik yang terafiliasi dengan ideologi Hindutva, seperti Narendra Modi dan BJP atau bahkan dilakukan secara tidak langsung untuk menghindari tanggung jawab hukumannya. Hal ini, diikuti dengan memainkan retorika populis anti Muslim yang menganggap Muslim merupakan diluar dari bagian ideologi Hindutva, permainan retorika populis ini terkadang juga dimainkan secara tidak langsung atau bahkan secara halus. Memainkan mobilisasi politik dan retorika populis dengan memanfaatkan populisme Hindu dapat dimanfaatkan Narendra Modi dan BJP sebagai strategi untuk mengejar agenda politiknya, menyebarkan ideologi Hindutva dalam kehidupan berbangsa di India yang kemudian terealisasikan dalam Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019.

Kata-kata kunci: Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019, Hindutva, India, Narendra Modi, Populisme.

ABSTRACT

To reduce the number of illegal immigrants entering India from various religions and countries, in 2019 under the Narendra Modi government, it was officially ratified. *The Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019* or also known as the 2019 Amendment to the Indian Citizenship Act. Hindu mobilization to distrust Muslims and position them as a threat while playing anti-Muslim populist rhetoric. When these two aspects are combined, it will be clear that Hindutva has become an ongoing political project during his administration. This Hindu mobilization was built slowly by political actors affiliated with Hindutva ideology, such as Narendra Modi and the BJP, or even indirectly to avoid responsibility for punishment. This was followed by playing anti-Muslim populist rhetoric that considers Muslims outside the Hindutva ideology. This populist rhetoric game is sometimes also played indirectly or even subtly. Playing political mobilization and populist rhetoric by exploiting Hindu populism can be used by Narendra Modi and the BJP as a strategy to pursue their political agenda, spreading Hindutva ideology in national life in India, which was then realized in the 2019 Amendment to the Indian Citizenship Act.

Keywords: *Citizenship Amendment Act 2019, Hindutva, India, Narendra Modi, Populism.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu imigrasi menjadi fenomena sosial yang penting untuk diperhatikan oleh setiap negara. Karena jika isu ini tidak diperhatikan oleh negara, maka akan banyak imigran ilegal yang dengan mudah masuk ke negara tersebut. Bagi India, isu ini dapat menjadi permasalahan yang krusial. Menurut sensus 2001, imigran ilegal yang masuk ke India totalnya ada 314 juta jiwa dengan paling banyak datang dari Bangladesh, disusul Sri Lanka, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Africa, dan Tibet (Mayilvaganan 2019). Dampak negatif dari kehadiran imigran ilegal ini dapat berdampak dalam berbagai macam aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sehingga isu ini perlu diperhatikan untuk menghindari hambatan yang dapat melemahkan India di masa depan dan mengorganisir administratif populasi supaya lebih terstruktur.

Untuk mengurangi banyaknya imigran ilegal yang masuk ke India dari berbagai macam agama dan negara, maka pada tahun 2019 di bawah pemerintahan Narendra Modi telah resmi disahkannya *The Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019* atau juga dikenal sebagai Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019. Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 ini diusulkan pertama kali oleh Narendra Modi pada tahun 2016. Akan tetapi, proses pengesahannya mulai berjalan di tahun 2019. Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 secara garis besar adalah mengatur tentang syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan India dan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Isi dari Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 ini akan mempercepat proses pemberian

kewarganegaraan hanya bagi mereka yang tergabung dalam komunitas agama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari Afghanistan, Bangladesh serta Pakistan sebelum kedatangan mereka di tahun 2014 (Ramadani 2020). Target dari Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 adalah memberikan perlindungan bagi imigran ilegal yang beragama minoritas dan menghadapi persekusi di negaranya, kecuali Muslim karena Muslim dari ketiga negara tersebut menjadi agama mayoritas. Sehingga, tidak mungkin agama mayoritas dari ketiga negara tersebut mengalami persekusi (BBC 2019c).

Pemerintah India belum pernah secara spesifik memberikan alasan mengapa negara-negara tetangga lainnya tidak diikutsertakan dalam amandemen ini yang kemudian telah mengecualikan Tiongkok tempat umat Buddha Tibet dan Muslim Uighur yang telah menderita penganiayaan serta penindasan budaya selama puluhan tahun. Sri Lanka tempat etnis Tamil telah menuduh adanya diskriminasi sistematis dan pelecehan yang disponsori negara serta Myanmar tempat Muslim Rohingya dianiaya secara sistematis. Bahkan di Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh ada sejumlah sekte Muslim non-mayoritas yang telah menghadapi penganiayaan sistematis dari sekte agama mayoritas atau kelompok etnis. Kelompok-kelompok ini termasuk Muslim Syiah, Hazara, dan Ahmadiyah. Selain itu, amandemen ini juga mengecualikan minoritas non-Muslim dari Tiongkok, Myanmar, dan Sri Lanka bersama dengan sekte minoritas Muslim dan kelompok etnis dari negara-negara sasaran Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh (Outlook News Desk 2024).

Adanya kebijakan ini ternyata telah menimbulkan perasaan cemas dan takut tidak hanya bagi imigran ilegal yang beragama Islam akan tetapi juga umat Muslim

di India (Srivastava 2019). Hal ini, ternyata dikarenakan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 mewajibkan umat Muslim India untuk dapat memberikan bukti mengenai kewarganegaraan India mereka. Apabila mereka tidak dapat memberikan buktinya, maka akan ada kemungkinan bahwa umat Muslim India dapat kehilangan kewarganegaraannya secara sepihak (Lestari, Zahidi, and Aufiya 2023).

Kebijakan ini mendapatkan kritikan dari berbagai pihak dan menuai protes unjuk rasa dari seluruh penjuru India yang merasa bahwa pemerintah India dilihat tidak adil dan bias terhadap komunitas agama tertentu serata tidak memperhatikan konstitusi India yang menggunakan prinsip sekularisme. Selain itu, Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 juga dianggap mendiskriminasi imigran ilegal yang beragama Islam di India yang belum mendapatkan kewarganegaraan India, dianggap sebagai strategi politik untuk meminggirkan populasi Muslim di India, dan agenda menyebarkan ideologi Hindutva dalam konstitusi India yang dilakukan oleh Narendra Modi dan BJP. Hal ini, dikarenakan visi BJP sejak pertama kali berdiri adalah membangun India dengan budaya Hindu dan membentuk India menjadi negara yang kuat serta memiliki rasa kesatuan (Rusmianti 2021).

Kritikan yang diberikan kepada Narendra Modi dan BJP tidak mengusik mereka untuk tetap melakukan pengesahan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019. Sebaliknya, Narendra Modi menyuruh warga negaranya untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir terhadap amandemen ini (BBC 2019a). Hal ini, juga disampaikan oleh para pemimpin BJP, termasuk Amit Shah, mengatakan bahwa RUU ini tidak menentang umat Muslim (BBC 2019b). Dalam permasalahan yang terjadi antara umat Muslim dan Hindu, meskipun berdampak sampai

terjadinya demo, kerusuhan, bahkan memakan korban jiwa, Narendra Modi tidak banyak memberikan respon bahkan terkesan diam atau acuh.

Meskipun Narendra Modi menyuruh warganya untuk tidak khawatir, RUU ini telah memantik protes besar di negara bagian Assam di timur laut yang kemudian memaksa pihak berwenang untuk mengumumkan jam malam dan menutup layanan internet (BBC 2019b). Selain itu, beberapa jadwal penerbangan pesawat dan kereta api dari dan ke wilayah Assam juga dibatalkan (The Economic Times 2019). Kota-kota besar di India juga tidak luput dari aksi protes, seperti di Kolkata, Mumbai, Hyderabad, New Delhi serta di sebagian besar sekitar kampus universitas (Swati Gupta, Omar Khan 2019).

Citra BJP sebagai partai dengan ideologi Hindutva sangatlah kuat dalam perpolitikan di India dan ingin mengembalikan kejayaan dari kerajaan Hindu di Asia Selatan menjadi visi dari BJP (Lestari, Zahidi, and Afiya 2023). Banyaknya dukungan juga datang dari warga India yang juga memiliki kesamaan untuk menjadikan India sebagai negara dengan basis ajaran agama Hindu (Waikar 2018). Dalam ideologi Hindutva, keberadaan Muslim dan Kristen berada “jauh di Arab atau Palestina” (Babar 2024). Karakteristik Muslim di mata Hindutva adalah sebagai penjahat, karena (1) mencuri tanah dan membagi Hindustan menjadi India-Pakistan dan (2) merampok sekularisme dan kesetaraan agama di India (Waikar 2018). Sahnya Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dapat menjadi realisasi janji politik dari Narendra Modi yang ingin menjadikan India sebagai tempat tinggal bagi orang-orang dari agama minoritas. Sehingga, hal ini pun akan selaras dengan ideologi Hindutva-nya BJP (Rusmianti 2021).

Sehingga, tidak heran jika Muslim dianggap sebagai “orang asing” atau secara spesifik “pengkhianat” yang kehadirannya mengancam eksistensi India masih menjadi bagian dari politik BJP saat ini (Mahmudabad 2020). Pihak oposisi juga telah mengatakan bahwa Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 telah mengorbankan populasi umat Muslim dan amandemen ini menjadi salah satu contoh dari agenda nasionalisme Hindu yang terus didorong oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan BJP (Rusmianti 2021).

Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 telah menarik perhatian mayoritas umat Hindu yang merasa terwakilkan sekaligus menciptakan provokasi antara umat Muslim dan umat Hindu di India. Sebagian besar warga India sangat mendukung penuh Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 ini (Anand 2020). Ideologi Hindutva yang ingin dijadikan sebagai dasar untuk membentuk negara Hindu telah masuk ke dalam konstitusi negara dan membuat nasionalisme Hindu di India semakin tersebar luas dan kuat (Damayanti, Robertua, and Mulyaman 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Politik Populisme dalam Pembentukan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana politik populisme dalam pembentukan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan dalam penelitian ini akan membahas tentang mobilisasi Hindutva dan retorika populis yang dilakukan oleh Narendra Modi dan BJP, baik sebelum atau sesudah sahnya Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019. Untuk spesifiknya cakupan dalam pembahasan ini akan berada dalam rentang 2014-2025. Dimulai pada tahun 2014 sejak awal terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India dan dalam kemenangan elektoral BJP. Pemilihan tahun dilakukan hingga 2025 karena pembahasan secara akademik mengenai Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 baru banyak dimulai tahun 2020. Sebabnya, dilatarbelakangi dari proses pengesahan amandemen ini yang mulai dilakukan pada 9–12 Desember 2019 hingga kemudian mulai efektif diberlakukan pada 10 Januari 2020. Sehingga, tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan artikel yang publikasinya di atas 2020. Pemilihan kebijakan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 di masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dilakukan karena tindakan ini menarik banyak respon dan cukup kontroversial di lingkup nasional atau internasional. Selain itu, juga dirasa adanya indikasi masuknya pengaruh ideologi Hindutva dalam kebijakan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dengan tidak mengikutsertakan Islam dalam persyaratannya. Kemenangan Perdana Menteri Narendra Modi untuk yang kedua kalinya

memunculkan harapan baru bagi mayoritas kelompok Hindu untuk bangkitnya nasionalisme Hindu di India.

1.5 Tinjauan Pustaka

Secara spesifik sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang cukup relevan dengan pembahasan mobilisasi politik dalam pembentukan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019. Akan tetapi, penulis dapat mencari dan saling menghubungkan relevansinya melalui masing-masing artikel yang kemudian dapat digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian pertama berupa laporan yang dilakukan oleh Aysenur Aygul dan Mobassera Jahan Fatima dengan judul penelitian "*Examination of Indian Citizenship Amendment (CAA) in The Context of Hindu Nationalism, Islamophobia/Anti-Muslim, and International Law*". Dalam penelitian ini, CAA membahas Islamofobia/Anti-Islamisme dalam konteks nasionalisme Hindu dan ujaran kebencian. CAA adalah refleksi dari populisme, nasionalisme Hindu, dan Islamofobia/anti-Islamisme yang telah meningkat di India selama rezim Narendra Modi berkuasa. Pembahasan di awal membahas latar belakang dari fenomena-fenomena tersebut dan menunjukkan bahwa praktik tersebut menysar umat Islam yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir (Aygul and Fatima 2022).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Prashant Waikar dengan judul penelitian "*Reading Islamophobia in Hindutva: An Analysis of Narendra Modi's Political Discourse*" yang menganalisis narasi Islamofobia dalam nasionalisme Hindu (Hindutva). Secara spesifik artikel ini menganalisis bagaimana Narendra Modi dan BJP menyampaikan Islamofobia di pidato, wawancara, dan *podcast*-nya.

Meskipun kemudian Islamofobia ini disampaikan secara halus, tetapi hal ini tetap menjelaskan cara Hindutva memandang rendah atau kurang pentingnya Muslim bagi umat Hindu. Ada dua narasi Islamofobia dalam wacana politik Narendra Modi yang telah digambarkan, yaitu (1) meniadakan sejarah Muslim India dalam agenda pembangunan ekonomi Narendra Modi, (2) menggambarkan Hinduisme sebagai penjinak Islam di India (Waikar 2018).

Artikel ketiga adalah artikel penelitian yang dilakukan oleh Gurharpal Singh dengan judul penelitian "*Hindu Nationalism in Power: Making sense of Modi and The BJP-led National Democratic Alliance Government, 2014-19*" yang membahas tentang kampanye ekstrem yang dilakukan BJP dan sekutunya setelah insiden Palwana ternyata tidak mempengaruhi dukungan terhadap mereka, buktinya BJP dan sekutunya berhasil menang telak dalam pemilihan Lok Sabha yang diadakan pada tanggal 11 April dan 19 Mei 2019. Kursi BJP bertambah menjadi 303, kembali lagi menguasai mayoritas di parlemen dan dengan sekutu regionalnya memiliki kemungkinan untuk menjabat selama lima tahun lagi. BJP kembali berkuasa dan pandangan ideologinya kemungkinan besar tidak akan dihalangi oleh mitra koalisinya. Saat ini akan ada prospek yang cerah bahwa nasionalisme Hindu akan menjadi kekuatan hegemonik dalam perpolitikan di India untuk jangka menengah. Terlebih Narendra Modi telah muncul sebagai aktor kuat yang dapat menjaga ketertiban, stabilitas, dan keamanan nasional. Paradoksnya adalah tentang nasionalisme Hindu kini memiliki potensi untuk membuat citra Narendra Modi sebagai penyelamat negara, diproyeksikan sebagai manusia dengan takdir memiliki misi untuk mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang belum pernah dilakukan India sejak kemerdekaannya (Singh 2019).

Berdasarkan beberapa artikel literatur di atas, peneliti akan melakukan penelitian terkait politik populisme dalam pembentukan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dengan melihat literatur di atas sebagai sumber pengetahuannya. Selain literatur di atas, peneliti juga menggunakan literatur lainnya untuk mendukung penelitian ini supaya lebih spesifik dalam menganalisis penelitian ini.

1.6 Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori mobilisasi populis dari Robert S. Jansen (2011). Mobilisasi populis oleh Jansen dipahami sebagai sebuah proyek politik. Jansen mengartikan proyek politik sebagai serangkaian kegiatan politik yang selaras dan berkelanjutan. Sekaligus mampu mempertahankan tingkat koherensi yang langgeng, baik dari segi landasan retorikanya maupun pelaksanaannya yang berkelanjutan. Kegiatan politik yang selaras dan berkelanjutan ini merupakan kumpulan dari praktik mobilisasi dan diskursif (Jansen 2011).

Selanjutnya, Jansen menjelaskan apa yang menjadikan sebuah proyek politik bersifat populis. Jansen mendefinisikan proyek mobilisasi populis sebagai proyek politik berkelanjutan dan berskala besar yang menggerakkan sektor-sektor sosial. Sektor-sektor sosial ini umumnya terpinggirkan dari aksi politik yang dilakukan secara terang-terangan dan kontroversial di depan publik. Ketika menggerakkan sektor-sektor sosial, di saat yang bersamaan juga sambil mengucapkan retorika nasionalis anti-elit yang menghargai orang-orang biasa. Dengan demikian, Jansen mengatakan bahwa mobilisasi populis menggambarkan setiap proyek-proyek

politik berkelanjutan yang menggabungkan antara mobilisasi rakyat dengan retorika populis. Istilah mobilisasi populis juga seharusnya hanya digunakan untuk proyek politik yang dimana keduanya hadir secara bersamaan dan saling memperkuat (Jansen 2011).

Retorika populis yang dimaksud adalah retorika anti-elit dan nasionalis yang mengangungkan rakyat biasa. Dalam artian luas, yaitu kumpulan tindakan simbolis, gaya ekspresi, pernyataan publik, definisi situasi, dan cara mengelaborasi gagasan secara luas menyerukan atau memperkuat prinsip populis yang secara timbal balik melegitimasi dan menghidupkan tindakan politik. Pada satu tingkat, retorika populis mengandaikan kesatuan sosial alami dan kebaikan yang melekat dari “rakyat”—mayoritas adalah anggota biasa dari komunitas nasional. Para pemimpin populis dapat mengembangkan argumen bahwa “rakyat” ini terdiri dari para pekerja, kaum miskin perkotaan, petani yang memiliki tanah atau tidak, penduduk asli, para profesional, kelas menengah atau bahkan bagian dari elit tertentu. Secara spesifik, isi dari retorika populis bermacam-macam secara historis dan kontekstual. Adanya perbedaan di struktur sosial, hubungan produktif, dan sistem politik dapat menghadirkan retorika populis yang sangat berbeda. Dimana pada saat yang bersamaan setiap negara kemungkinan memiliki sejarahnya masing-masing dalam hal gaya dan simbolisme politik, representasi dan narasi kelompok serta pembuatan klaim dan pembingkaiannya yang kemudian semuanya berkontribusi pada variasi isi retorika populis (Jansen 2011).

Mobilisasi populis sebagai sebuah proyek politik adalah hal yang penting karena dapat menentukan aktor dan organisasi yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa politik populis adalah tentang para pemimpin yang memobilisasi

pendukung. Menurut Jansen, mobilisasi politik merupakan sebuah cara politik yang dapat dilakukan oleh penantang dan petahana dari golongan mana saja dalam mengejar berbagai macam agenda sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini, mengimplikasikan bahwa populisme tidak hanya harus dikategorikan sebagai sebuah gerakan atau rezim, melainkan dapat dipahami sebagai sebuah cara yang fleksibel untuk mengumpulkan dukungan politik (Jansen 2011).

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini penulis memiliki argumen bahwa dengan tidak mengikutsertakan agama Islam dalam persyaratan untuk mendapatkan status hak kewarganegaraan dapat menunjukkan bahwa Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 menjadi bagian dari mobilisasi populis di era pemerintahan Narendra Modi. Caranya dilakukan melalui mobilisasi Hindu untuk tidak percaya lagi dengan Muslim dan menempatkan Muslim sebagai ancaman sambil memainkan retorika populis anti Muslim. Ketika kedua aspek ini digabungkan maka akan mendapatkan gambaran bahwa Hindutva menjadi proyek politik yang berkelanjutan selama masa pemerintahannya. Mobilisasi Hindu ini dibangun secara pelan-pelan oleh aktor politik yang terafiliasi dengan ideologi Hindutva, seperti Narendra Modi dan BJP atau bahkan dilakukan secara tidak langsung untuk menghindari tanggung jawab hukumannya. Hal ini, diikuti dengan memainkan retorika populis anti Muslim yang menganggap Muslim merupakan diluar dari bagian ideologi Hindutva, permainan retorika populis ini terkadang juga dimainkan secara tidak langsung atau bahkan secara halus.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif. Moleong (2002) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena-fenomena apa saja yang dialami oleh subjek penelitian misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus secara alami dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah politik populisme, sedangkan objek penelitian adalah Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 di bawah kepemimpinan Narendra Modi.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dalam bentuk literatur. Dalam pengumpulan literatur ini, penulis akan lebih banyak menggunakan literatur berupa jurnal, artikel media massa, website resmi pemerintah, dan buku yang relevan dengan penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian adalah tahapan penelitian yang harus dilakukan ketika sedang melakukan penelitian. Tahapan-tahapan ini akan membantu penulis untuk

melakukan penelitian terkait topik yang akan ditulis. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan Menyiapkan Literatur

Tahapan awal yang harus dilakukan oleh penulis adalah mencari berbagai sumber-sumber terpercaya yang dapat sesuai dengan fokus penelitian dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Sumber-sumbernya dapat berupa jurnal, artikel media massa, website resmi pemerintah, dan buku yang relevan dengan penelitian.

2. Analisis Literatur

Ketika data telah didapatkan oleh penulis tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan data tersebut dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca data kemudian menyimpulkan apakah data yang didapat sudah sesuai dengan topik penelitian.

3. Proses Penulisan Analisis

Penulis mulai menulis topik penelitian berdasarkan data yang sudah didapat sebelumnya dan juga menambahkan pendapat dari penulis.

4. Review

Setelah menulis penelitian, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh penulis adalah melakukan *review* terhadap tulisannya. Hal ini dilakukan supaya data yang sudah ditulis sesuai dengan penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini penulis memaparkan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Bab 1 penulis akan menjelaskan beberapa sub bab mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab 2 ini akan membahas peran penting identitas yang dapat mempengaruhi karakter kepemimpinan Narendra Modi dan kemudian mendorong legitimasi Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019. Penekanan identitas Narendra Modi dilakukan dengan menekankan soal identitas mayoritas Hindu untuk memobilisasi rakyat. Identitas agama kemudian menjadi alat untuk mendapatkan simpati dan memobilisasi dukungan massa. Selain itu, juga menjelaskan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 serta kontroversialnya.

Kemudian pada Bab 3 akan memberikan hasil dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana politik populisme dalam pembentukan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dengan menggunakan teori mobilisasi populis dari Robert S. Jansen (2011).

Pada bab terakhir atau Bab 4, penulis memberikan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang telah diajukan dan saran rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

FAKTOR IDENTITAS DALAM KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI DAN AMANDEMEN UU KEWARGANEGARAAN INDIA 2019

Bab ini akan membahas peran penting identitas yang dapat mempengaruhi karakter kepemimpinan Narendra Modi dan kemudian mendorong legitimasi Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019. Penekanan identitas Narendra Modi dilakukan dengan menekankan soal identitas mayoritas Hindu untuk memobilisasi rakyat. Identitas agama kemudian menjadi alat untuk mendapatkan simpati dan memobilisasi dukungan massa.

2.1 Politik Identitas dalam Kepemimpinan Narendra Modi

Untuk menelusuri perjalanan politik identitas dalam kepemimpinan Narendra Modi, kita tidak dapat jauh dari ideologi Hindutva itu sendiri. Ideologi Hindutva pertama kali diperkenalkan oleh Vinayak Damodar Savarkar (T. 2020). Savarkar menjadi pelopor nasionalisme Hindu ekstrem yang kemudian ingin menjadikan India sebagai negara Hindu dan menurutnya Hindutva adalah kehidupan ras besar serta menganggap bahwa kisah India merdeka merupakan bagian dari kisah bangsa Hindu (T. 2020).

Akan tetapi untuk umat Muslim dan Kristen tidak termasuk dalam ideologi Hindutva ini, karena Savarkar mengatakan bahwa tanah suci mereka terletak “jauh di Arab atau Palestina” (Babar 2024). Untuk memahami gerakan ideologi Hindutva dalam politik India tentu saja tidak terlepas dari adanya pengaruh organisasi *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS) dan partai politik *Bharatiya Janata Party*

(BJP) yang populer ini dan terlebih dalam masa pemerintahan di bawah Perdana Menteri Narendra Modi. Pengaruh besar dari organisasi dan partai politik ini tentu saja akan menguatkan praktik untuk menggapai cita-cita dari kemunculan ideologi Hindutva, yaitu menjadikan India sebagai negara bangsa Hindu (Babar 2024).

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) merupakan sebuah organisasi nasionalis Hindu yang menolak paham sekularisme dan menjunjung tinggi Hinduisme dalam konstitusi negara (Suastha 2018). Istilah Hindutva digunakan oleh kepala RSS yang menganggapnya sebagai representasi dari budaya India sebagai negara Hindu (T. 2020). Untuk membuat keberadaan ideologi Hindutva semakin kuat dan terorganisir, Madhav Sadashiv Golwalkar, seorang Sarasangchalak menjadikan RSS sebagai organisasi populer di India. Kefanatikannya terhadap Hindutva dapat dilihat ketika Golwalkar mengeluarkan pernyataan bahwa musuh internal bagi agama Hindu dan bangsa India yang pertama adalah umat Muslim, kedua umat Kristen, dan ketiga komunis (T. 2020).

Perjalanan karir politik Narendra Modi telah dimulai sejak awal tahun 1970-an dengan bergabung bersama RSS. Narendra Modi mengalami perkembangan yang signifikan dalam hirarki RSS sehingga hal ini juga berdampak terhadap hubungannya dengan RSS dan memberikan keuntungan bagi karir politiknya di masa depan (D'Souza 2021). Pada tahun 1987 Narendra Modi memutuskan untuk bergabung dengan *Bharatiya Janata Party* (BJP), salah satu partai nasional di India yang pro-Hindu dan berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Hindutva dalam kehidupan di India. Selain itu, mengembalikan kejayaan dari kerajaan Hindu di Asia Selatan menjadi visi dari BJP (Lestari, Zahidi, and Aufiya 2023).

Citra BJP sejak tahun 1989 adalah mempromosikan nilai-nilai agama Hindu yang kemudian ingin digunakan sebagai landasan dalam bermasyarakat dan budaya di India (DW 2022). Terkenalnya politik Hindutva dalam 30 tahun terakhir merupakan hasil dari kuatnya jaringan organisasi yang dimiliki oleh Hindutva itu sendiri, mulai dari para pemikir yang besar dan kompleks, institusi serta adanya jaringan besar yang baik dalam lingkup formal maupun informal (T. 2020).

Isu Hindutva ini sangat aktif digunakan bahkan terkesan agresif dan telah berhasil mengantarkan BJP pada kemenangan elektoralnya. Kampanye BJP identik dengan narasi-narasi identitas yang menyudutkan kelompok minoritas Muslim di India. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan dan eksistensi Narendra Modi yang kuat serta datang dari kelompok *Other Backward Caste* (OBC) menjadi kesempatan baik bagi BJP untuk menyuarakan aspirasi kelompok lintas kasta dengan mengusungnya menjadi Perdana Menteri. Besarnya peradaban dan budaya yang dimiliki oleh India serta kuatnya dominasi Hindu ternyata sangat berpengaruh dalam pembentukan pola pikir atau karakteristik masyarakat India melalui nilai-nilai dari Hindutva. Seperti contohnya, bagi Narendra Modi.

Kampanye Narendra Modi di tahun 2014 berbicara tentang perubahan serta harapan yang menjanjikan tentang reformasi besar ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan serta proyek infrastruktur yang juga menawarkan hadiah secara lebih nyata mengenai toilet di setiap rumah, smartphone di setiap tangan, dan rekening bank untuk setiap nama. Setidaknya sementara janji-janji ini diberikan untuk menangkis kekhawatiran tentang reputasi nasionalisme Hindu sayap kanan BJP (Agrawal 2019). Setelah gencar melakukan kampanyenya dan mendapatkan respon bagus atas apa yang telah dilakukannya Narendra Modi dan BJP pada akhirnya

berhasil untuk meraih kemenangan sebagai Perdana Menteri India. Penekanan soal identitas mayoritas orang Hindu dilakukannya dengan pengawasan terhadap promosi budaya Hindu (D'Souza 2021). Promosi budaya Hindu dilakukan dengan cara membuat kebijakan untuk melarang penjualan sapi dengan tujuan disembelih dan diharapkan langkah ini dapat menarik perhatian umat Hindu secara luas. Hal ini, dapat menjadi mobilisasi kebencian ke umat Muslim karena bertentangan dengan kepercayaan umat Hindu di India yang mempercayai bahwa sapi itu sangat suci karena sapi adalah dewa mereka. Selain itu, pada tahun 2015 juga ada percobaan untuk menghapus nama-nama yang berkaitan dengan sejarah Muslim Mughal dan Kolonial India di masa lalu (Aulia 2023).

Pada tahun 2019 Narendra Modi dengan berhati-hati mengalihkan fokus pesan yang disampaikannya berupa keamanan nasional dan penekanan politik identitas dimana dia melabeli dirinya sebagai penjaga keamanan atau *chowkidar* untuk menekankan kemampuan dirinya dalam menjaga keamanan India, terutama untuk umat Hindu (Rusmianti 2021). Dalam pidato kemenangannya di New Delhi setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri India 2019, Narendra Modi menanggapi seruan yang diberikan kepadanya dan memanfaatkannya untuk membangun citra menjadi seseorang yang rendah hati. Memposisikan dirinya sebagai sanyasi yang artinya orang suci atau pertapa. Mengagungkan pertapa ini merupakan tradisi Hindu karena filosofi mereka tentang kebenaran hidup dan kelahiran kembali. Filosofi ini ada di semua kitab suci tradisi Hindu kuno. Selanjutnya, Narendra Modi memulai pidatonya dengan menyebut dirinya sebagai fakir (orang suci dalam kemiskinan). Orang suci dalam kemiskinan ini merupakan tradisi penolakan urusan

atau ketertarikan terhadap duniawi bagi Hindu kuno, karena tujuannya hanya ingin mencapai Tuhan dan melayani masyarakat (Sreepada 2025).

Semenjak India berada di masa pemerintahan Narendra Modi dan BJP telah banyak umat Muslim yang menjadi sasaran dari para aktivis Hindu (Reuters 2023). Musik dengan tema anti-Muslim juga semakin berkembang di India. Sandeep Chaturvedi menyanyikan sebuah lagu tentang Masjid Gyanvapi yang sedang menjadi kontroversi karena ada perselisihan tempat ibadah antara umat Hindu dan umat Muslim India. Lirik lagu tersebut bernada hinaan karena penderitaan yang dirasakan oleh umat Hindu selama ini disebabkan oleh umat Muslim maka saat ini waktunya pembalasan (Rao 2022).

Penekanan identitas Hindu dan mobilisasi kebencian terhadap umat Muslim tidak hanya dilakukan oleh Narendra Modi. Tiga dekade lalu ekstrimis Hindu merusak dan menghancurkan masjid di era Mughal dan sekarang pemerintah India membangun kuil di bekas lahan tersebut yaitu di kota suci Ayodhya. Harsh V Pant, Guru Besar Studi Asia Selatan di King's College London mengatakan pasca penghancuran tersebut BJP berhasil memanfaatkan sentimen Hindu yang kemudian semakin menguat dimana semua orang mempercayai narasi Hindutva, merespon secara baik pesan-pesan yang disampaikan, dan mempercayai bahwa tidak ada gagasan yang lebih baik dari partai lain (DW 2022). BJP juga turut mendukung pembangunan patung Chhatrapati Shivaji, pejuang Hindu yang dianggap berjasa karena telah meruntuhkan Kesultanan Mughal dan berdampak pada berakhirnya kejayaan Islam di India. Patung Chhatrapati Shivaji di bangun dengan tinggi 210 meter dengan biaya USD 300 juta (DW 2022).

2.2 Kebijakan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019

Hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan status kewarganegaraan India telah diatur dalam UU Kewarganegaraan India 1955. Seiring berjalannya waktu populasi di India semakin bertambah karena selain ditinggali oleh penduduk asli India, para imigran, dan pengungsi dengan berbagai latar belakang juga banyak yang menetap di India sehingga hal ini membuat pemerintahan India bergerak untuk membuat kebijakan dalam mengatur warga negaranya.

UU Kewarganegaraan India 1955 telah mengalami amandemen sebanyak lima kali yang dimulai dari tahun 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 dan terbaru ini terjadi di tahun 2019. Sahnya Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 menjadi kontroversi karena adanya indikasi masuknya nilai-nilai dari ideologi Hindutva dengan mengecualikan umat Muslim dalam kebijakan domestik India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Berikut isi dari Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 (The Citizenship (Amendment) Bill 2019 2019).

“Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1955 (selanjutnya disebut Undang-Undang Utama), dalam pasal 2 ayat (1), dalam ayat (b) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu:—

“Asalkan setiap orang yang tergabung dalam komunitas Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen dari Afghanistan, Bangladesh atau Pakistan, yang masuk ke India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat dengan atau berdasarkan klausul (c) sub-bagian (2) dari bagian 3 Undang-Undang Paspor (Masuk ke India), 1920 atau dari penerapan ketentuan Undang-Undang Orang Asing, 1946 atau aturan atau perintah apa pun yang dibuat di bawahnya, tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal untuk tujuan Undang-Undang ini;” (The Citizenship (Amendment) Bill 2019 2019).

Berdasarkan isi dari Amandemen UU Kewarganegaraan 2019 yang telah dipaparkan di atas maka secara garis besar amandemen tersebut menyatakan bahwa India memberikan hak untuk mempercepat pemberian kewarganegaraan kepada

orang-orang dari enam agama, yaitu Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari tiga negara dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan serta tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkan hak kewarganegaraan bagi siapapun dari negara dan agama lain terutama Muslim sebelum 2014.

Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 diperkenalkan pada 9 Desember 2019 di Parlemen India oleh Menteri Dalam Negeri Amit Shah (HT Correspondent 2019). Mendapatkan dukungan dari 311 anggota parlemen dan 80 anggota lainnya menentang RUU tersebut (TNN 2019). Kemudian disahkan oleh Rajya Sabha pada tanggal 11 Desember 2019 di Lok Sabha dengan 125 suara mendukung dan 99 suara menolak (Nath and Singh 2021). RUU Amandemen Kewarganegaraan mendapat dukungan dari 130 crore (senilai 1,3 M) warga negara karena merupakan bagian dari manifesto BJP di tahun 2014 serta pemilu Lok Sabha 2019 dan Kongres Trinamool beserta partai oposisi lainnya menentang kebijakan ini (PTI 2019).

Narendra Modi membantah bahwa ini merupakan bagian dari Hindutva atau agenda untuk meminggirkan umat Islam dan mengatakan bahwa umat Islam tidak dilindungi oleh amandemen tersebut karena mereka bukan agama minoritas sehingga tidak memerlukan perlindungan dari India (BBC 2019c). Dalam lingkup domestik selain BJP, partai sekutunya juga mendukung amandemen ini seperti Janata Dal (United), AIADMK, Biju Janata Dal, TDP, YSR-Congress, AGP, PMK, SDF, dan BDF bersama dengan Partai Independen, termasuk anggota yang dicalonkan (TNN 2019).

Beberapa organisasi Jain, seperti Jain Mahasangh Tricity, Shri Digambar Jain Society (sektor 27), Shri SS Jain Sabha (sektor 18), Shri Atmanand Jain Sabha

(sektor 28), Shri Jain Swetambar Terapanth Sabha (sektor 24), Jain Milan, Ahinsa Seva Samiti, Samaj Sevi Sansthan Yayasan Pratigya, dan Purvanchal Kalyan Sabha (sektor 56) bertemu dengan presiden BJP Chandigarh, Sanjay Tandon untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan dukungan mereka terhadap Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 ini (HT Correspondent 2019).

Bahkan hampir 100 pengacara di Mumbai juga melakukan aksi demonstrasi luar Pengadilan Tinggi Bombay untuk mendukung amandemen ini yang menurut mereka telah sah secara konstitusional. Mereka melakukan aksi demonstrasi sambil meneriakkan kalimat seperti “*We support CAA*”, “*Bharat Mata ki Jai*” (Kemenangan untuk Ibu India), dan “*Vande Mataram*” (Aku memujinya, Ibu) (PTI 2024).

Sehubungan dengan dikeluarkannya Amandemen UU Kewarganegaraan 2019 ini sejumlah polemik mulai bermunculan di India bahkan menyebabkan kekerasan dan memakan korban jiwa. Aksi protes yang kemudian meletus menjadi kekerasan ini telah terjadi di wilayah negara bagian Assam, dimana polisi harus melepaskan tembakan di daerah Lalung Gaon di Guwahati setelah pengunjuk rasa melemparkan batu dan mengakibatkan setidaknya 4 orang terluka dalam penembakan tersebut (The Economic Times 2019).

Selain itu, Pemimpin *AASU and the North East Students' Organization* (NESO) juga mengatakan bahwa mereka akan mengamati 12 Desember sebagai '*Black Day*' setiap tahun karena protes terhadap pengesahan RUU di Parlemen. Hal ini dikarenakan polisi telah melepaskan tembakan ke udara di beberapa daerah karena suasana berubah menjadi zona perang ketika pengunjuk rasa mulai merusak toko dan bangunan, membakar ban, serta melakukan bentrok dengan aparat (The

Economic Times 2019). Distrik Kamrup menutup total kantor, semua lembaga pendidikan, semua jalan utama termasuk NH 31 yang diblokir pada hari itu. Para pekerja kebun di Distrik Lakhimpur, Charaideo, Numarligarh, Golaghat, dan beberapa daerah di Distrik Tinsukia juga berhenti bekerja. Selain itu, beberapa jadwal penerbangan pesawat dan kereta api dari dan ke wilayah Assam juga dibatalkan (The Economic Times 2019).

Para pekerja BJP mengadakan demonstrasi untuk mendukung Amandemen UU Kewarganegaraan 2019 di Bengal Barat meskipun Ketua Menteri Bengal Barat, Mamata Banerjee menegaskan bahwa dia tidak akan mengizinkan penerapan undang-undang tersebut di negara bagiannya selama dia hidup (Times of India 2019). Mantan anggota BJP di Lok Sabha, yaitu Anupam Hazra memimpin unjuk rasa lainnya di daerah Behala, Kolkata dan mengatakan bahwa partai yang berkuasa telah menyesatkan masyarakat mengenai amandemen ini. Penolakan juga diberikan oleh Ketua Menteri Punjab, Kerala, Madhya Pradesh, dan Chhattisgarh yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menerapkan amandemen tersebut (BBC 2019).

Pemimpin oposisi dari Partai Kongres India, Sonia Gandhi menuduh pemerintah telah menciptakan suasana ketegangan agama demi kepentingan politik (BBC 2019). Respon untuk menentang kebijakan ini juga datang dari mahasiswa yang melakukan aksinya di luar kampus Universitas Muslim Aligarh, dimana petugas polisi memaksa masuk untuk menyerbu kampus, menyerang, dan menangkap mahasiswa serta berdampak setidaknya 60 mahasiswa mengalami luka-luka (Nath and Singh 2021). Mahasiswa Universitas Nadwa di Lucknow juga melakukan aksi protes di dalam kampus, akan tetapi polisi mengunci gerbang

kampus dari luar sehingga bentrok terjadi antara polisi dan mahasiswa di dalam kampus (Gosh 2019). Anggota parlemen Muslim terkenal, Asaddudin Owaisi mengatakan bahwa kebijakan ini lebih buruk daripada hukum Hitler serta ini konspirasi untuk membuat umat Islam tidak memiliki kewarganegaraan dan politisi regional terkemuka Akhilesh Yadav menyebutnya sebagai “rencana perpecahan untuk mengalihkan perhatian” dari kegagalan pemerintah (BBC 2019).

Liga Muslim Persatuan India juga melayangkan petisi ke Mahkamah Agung dan berpendapat bahwa RUU ini telah melanggar pasal kesetaraan, hak-hak dasar serta hak untuk hidup (BBC 2019). Anggota parlemen *Trinamool Congress* (TMC) Mahua Moitra, pemimpin *Congress* Jairam Ramesh, advokat Ehtesham Hashmi, presiden Partai Perdamaian Mohammad Ayub, *NGO Rihai Manch and Citizens Against Hate, the All Assam Students' Union* (AASU) dan mantan komisaris tinggi India untuk Bangladesh Deb Mukherjee termasuk di antara mereka yang mengajukan petisi menentang dengan alasan bahwa amandemen tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar hak-hak dasar (Anuja and Varma 2019).

Sahnya Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 juga telah mendapatkan respon dari dunia internasional. Robby menjelaskan bahwa lambatnya respon Indonesia dalam merespon implementasi CAA/NRC telah mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengundang pertemuan dengan Duta Besar India. Meskipun ada tuntutan dari masyarakat sipil, tetapi hal ini tidak mendesak pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat karena pemerintah Indonesia tidak benar-benar ingin terlibat dalam urusan dalam negeri India dan tidak ingin responnya mempengaruhi kerjasama keduanya meskipun India-Indonesia memiliki ikatan yang kuat. Berbanding terbalik dengan hubungan India-Malaysia, Malaysia

melihat dirinya sebagai negara yang lebih mementingkan kredibilitasnya sebagai negara Muslim dibandingkan mitra strategis India sehingga hal ini mempengaruhi dan mengganggu dinamika hubungan bilateral keduanya (Robby 2022).

Selain itu, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia mengutip Juru Bicara Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa: “Seperti yang kami sampaikan pada tahun 2019, kami khawatir bahwa UU Kewarganegaraan (Amandemen) India tahun 2019 pada dasarnya bersifat diskriminatif dan melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional India.” (Outlook Web Desk 2024).

BAB 3
PENGARUH POPULISME TERHADAP AMANDEMEN UU
KEWARGANEGARAAN INDIA 2019

Untuk mengurangi banyaknya imigran ilegal yang masuk ke India dari berbagai macam agama dan negara, maka pada tahun 2019 di bawah pemerintahan Narendra Modi telah resmi disahkannya *The Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019* atau juga dikenal sebagai Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019. Akan tetapi, amandemen ini menuai kontroversial karena dianggap telah mendiskriminasi imigran ilegal, dianggap sebagai strategi politik untuk meminggirkan populasi Muslim di India, dan agenda menyebarkan ideologi Hindutva dalam konstitusi India yang dilakukan oleh Narendra Modi dan BJP. Kritik dan demo hingga sampai pecahnya kerusuhan telah terjadi akibat adanya amandemen ini. Terjadinya mobilisasi politik oleh Pemerintah India dan penggunaan retorika populis dalam CAA 2019 akan menampilkan bahwa Hindutva telah menjadi proyek politik di era pemerintahan Narendra Modi sebagai strategi yang fleksibel untuk mendapatkan dukungan politik yang kemudian dibungkus dalam kebijakan demi kepentingan publik.

3.1 Mobilisasi Politik oleh Pemerintah India

Untuk memahami gerakan ideologi Hindutva dalam politik India tentu saja tidak terlepas dari adanya campur tangan Narendra Modi dan BJP. BJP merupakan partai nasionalis resmi di India pro-Hindu yang berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Hindutva dalam berkehidupan di India. Mengembalikan kejayaan dari

kerajaan Hindu di Asia Selatan menjadi visi dari BJP (Lestari, Zahidi, and Aufiya 2023). Tahun 2014 menjadi awal angin politik segar bagi Hindutva untuk masuk dalam perpolitikan di India. yang dibawa oleh BJP. Membawa ideologi Hindutva sebagai skema berpikir dari BJP akan membuat arah prioritas strategi BJP lebih memperhatikan hak-hak mayoritas. Kekuatan terhadap kepercayaan dan budaya Hindu yang masih mengakar dengan kuat dan ditaati oleh mayoritas masyarakat India bahkan hingga ke pemerintahannya yang kemudian dapat mendorong langkah pembuatan kebijakan berdasarkan pada kepercayaan dan budaya Hindu.

Ada beberapa upaya Narendra Modi dan BJP dalam memobilisasi kebencian terhadap umat Muslim dan ujaran kebencian yang kemudian meningkatkan sentimen anti-Islamisme di India antara orang Hindu dan Muslim, seperti contohnya *Love Jihad*, kampanye Ghar Wapsi (kembali ke rumah), dan UU Penyembelihan Sapi (Aygul and Fatima 2022).

Rao menjelaskan bahwa *Love Jihad* merupakan propaganda yang mengklaim bahwa "*Jihad*" di India dilakukan oleh pria Muslim untuk menipu perempuan Hindu supaya mau menikahi mereka dan masuk Islam (Aygul and Fatima 2022). Kaum nasionalis sayap kanan membangun citra Love Jihad sebagai strategi yang digunakan oleh Muslim untuk meningkatkan populasi Muslim dalam rangka pertempuran demografis dengan tujuan mengalahkan populasi umat Hindu. Praktek ini mendapatkan legitimasi dari perempuan Hindu yang menjadi korban. Kelompok sayap kanan Hindu mengatakan bahwa menurut mereka para pria Hindu ini sering dianggap sebagai pelindung khusus bagi perempuan Hindu yang kemudian didefinisikan sebagai satu-satunya hak istimewa mereka (Aygul and Fatima 2022). Dalam pemilu 2019, propaganda *Love Jihad* menjadi alat mobilisasi digital oleh

BJP melalui *WhatsApp public group* sehingga ternyata pesan-pesan dengan ujaran kebencian ini menyebar dengan sangat cepat (Saha et al. 2021).

Kampanye Ghar Wapsi (kembali ke rumah) adalah kampanye untuk mendesak orang non Hindu di India agar kembali ke tempat kelahiran mereka. Pada akhir tahun 2014, kampanye ini menjadi luas karena berkaitan dengan konsep dari agama Hindu yang menganggap semua orang berasal dari "Hindu". Kelompok sayap kanan mengklaim bahwa Muslim yang berasal dari Kekaisaran Mughal menyerbu India, memperbudak masyarakatnya, dan memaksakan sebagian besar masyarakat India untuk masuk Islam (Aygul and Fatima 2022).

UU Penyembelihan Sapi menjadi salah satu meningkatkan kebencian terhadap umat Muslim. Hal ini, sampai berdampak pada pembunuhan massal terhadap Muslim miskin yang kemudian memicu perdebatan dunia. Kelompok HAM Hindu menunjukkan keberanian mereka untuk menghukum Muslim dalam konteks UU perlindungan sapi dengan memberikan denda dan menuduh Muslim membawa ternak sapi yang ada di jalanan. Penyembelihan sapi dilarang dan diatur dalam pasal 48 konstitusi India dengan bentuk hukuman penjara 6-14 tahun. Akan tetapi, di tahun 2017 beberapa negara bagian mendesak pemerintah untuk meningkatkan hukuman bagi penyembelihan sapi. Main hakim sendiri dalam konteks perlindungan sapi ini telah dilakukan dengan memukuli atau bahkan membunuh orang-orang yang dituduh (Aygul and Fatima 2022).

Mobilisasi Hindu ketika pengesahan CAA 2019 dapat kita lihat melalui kacamata di dalam parlemen India. Melalui kacamata di dalam parlemen, untuk meloloskan rancangan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 ini Narendra Modi dan BJP dapat memanfaatkan hubungannya dengan kelompok Hindutva dari

kursi anggota parlemen, dimana mayoritas diduduki dari partai BJP dan sekutunya. Berdasarkan data laporan dalam pemilihan umum di Lok Sabha ke-17, BJP memenangkan 303 kursi yang kemudian membuat BJP menjadi partai tunggal terbesar dari mayoritas anggota parlemen di Lok Sabha ke-17 (Kumar 2019). Hal ini, membuat rancangan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dapat lolos dengan mulus tanpa adanya hambatan. Dalam pengesahan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 di Lok Sabha ke-17, 311 anggota parlemen mendukung dan 80 anggota lainnya menentang (TNN 2019).

Setelah kemenangannya menjadi mayoritas anggota parlemen di Lok Sabha ke-17, BJP tentu saja juga ingin mendorong kedudukannya di Rajya Sabha. Keanggotaan di Rajya Sabha lebih terbatas dibandingkan di Lok Sabha, hanya maksimal untuk 250 anggota dengan 12 anggota dipilih langsung oleh Presiden India sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Sedangkan di Rajya Sabha, BJP menduduki 75 kursi dan 149 kursi diduduki oleh sekutunya seperti, Janata Dal, AIADMK, dan Biju Janata Dal (Rusmianti 2021). Dalam pengesahan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 di Rajya Sabha, 125 suara mendukung dan 99 suara menolak (Nath and Singh 2021) sehingga akhirnya rancangan UU Amandemen Kewarganegaraan India 2019 dapat lolos dengan suara terbanyak.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa BJP dengan partai berideologi Hindutva ditambah BJP menjadi mayoritas anggota parlemen Lok Sabha ke-17 dan rancangan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 ini juga mendapatkan dukungan penuh di Rajya Sabha, maka Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 memiliki peluang yang sangat besar untuk disahkan di parlemen ketika masih menjadi rancangan.

3.2 Retorika Populis dalam CAA 2019

Selain memainkan mobilisasi Hindutva dalam mendapatkan dukungan umat Hindu, Narendra Modi dan BJP juga menggunakan retorika populisnya untuk menciptakan sentimen terhadap umat Muslim. Meskipun terkadang dilakukan secara halus atau tersirat. Narendra Modi pernah menyampaikan pernyataan yang mengatakan bahwa Muslim India adalah orang-orang patriotik, tidak akan pernah tertarik dengan kelompok teror seperti Al-Qaeda. Lebih lanjut, Narendra Modi menyatakan bahwa Muslim India mewarisi dan menganut Islam Hindu. Islam Hindu itu mengajarkan cinta penuh kasih dan damai, seperti orang India lainnya. Padahal Islam di ajaran Hindu dibingkai sebagai kelompok yang keras. Secara tidak langsung Narendra Modi mengatakan bahwa Hinduismelah telah menjinakkan Islam dan menjadikan Islam India sebagai karakter yang humanis dan tidak menyukai kekerasan. Sehingga, tidak mungkin Islam India bergabung dengan Al-Qaeda karena mereka adalah Islam yang keras (Waikar 2018).

Pada kampanye 2014, Narendra Modi mendeskripsikan dirinya sebagai seorang pemimpin rakyat yang rendah hati, yang akan menggulingkan elit sekuler dan akan mengembalikan kekuasaan masyarakat Hindu asli di India, yang telah lama ditindas oleh Muslim (Yilmaz and Morieson 2022). Sedangkan, pada tahun 2019 Narendra Modi dengan berhati-hati mengalihkan fokus pesan yang disampaikannya berupa keamanan nasional dan penekanan politik identitas dimana dia melabeli dirinya sebagai penjaga keamanan atau *chowkidar* untuk menekankan kemampuan dirinya dalam menjaga keamanan India, terutama untuk umat Hindu (Rusmianti 2021). Dalam pidato kemenangannya di New Delhi setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri India 2019, Narendra Modi menanggapi seruan yang diberikan kepadanya dan memanfaatkannya untuk membangun citra menjadi seseorang yang

rendah hati. Memposisikan dirinya sebagai sanyasi yang artinya orang suci atau pertapa.

Mengagungkan pertapa ini merupakan tradisi Hindu karena filosofi mereka tentang kebenaran hidup dan kelahiran kembali. Filosofi ini ada di semua kitab suci tradisi Hindu kuno. Selanjutnya, Narendra Modi memulai pidatonya dengan menyebut dirinya sebagai fakir (orang suci dalam kemiskinan). Orang suci dalam kemiskinan ini merupakan tradisi penolakan urusan atau ketertarikan terhadap duniawi bagi Hindu kuno, karena tujuannya hanya ingin mencapai Tuhan dan melayani masyarakat (Sreepada 2025). Pada agenda ekonomi pembangunan, visi Narendra Modi atas kemajuan India bergantung pada citra masa lalu India. Sehingga, Narendra Modi mengatakan bahwa “Tim India” harus berjuang sama-sama untuk merebut kembali kejayaan sejarah India (Waikar 2018). Ada beberapa narasi yang menunjukkan bahwa Narendra Modi memberikan usulan untuk melakukan beberapa tindakan, seperti (Waikar 2018):

Universitas Patna perlu memimpin inovasi untuk menghidupkan kembali kejayaan ketika masa "Nalanda dan Vikramshila"—universitas yang "setua Sungai Gangga", sebuah perumpamaan yang kuat mengingat Sungai Gangga kemungkinan besar sudah ada selama beberapa milenium—menjadikan Bihar sebagai pusat pendidikan terkemuka di kawasan ini (Modi dalam Waikar 2018).

Masyarakat Bihar harus "membawa Bihar ke tingkat yang lebih tinggi", menjauh dari kemiskinan dan keterbelakangan yang endemik untuk meniru "sejarah agung... tiga negara kuno besar—Ang, Magadh, dan Mithila"—yang di titik berbeda tersebar di benua ini dari Bihar modern (Modi dalam Waikar 2018).

Berdasarkan dari beberapa contoh narasi di atas tentang agenda pembangunan ekonomi India maju, Narendra Modi memvisualisasikannya berdasarkan kehidupan Hindu India. Hal ini, Ini menunjukkan bahwa pengalaman Hindu

menjadi gambaran dari wacana pembangunannya, hanya dari pengalaman Hindu tidak ada pengalaman dari agama lainnya. Dalam retorika populis terhadap Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019, Narendra Modi mengatakan bahwa agama Islam tidak mungkin mengalami persekusi di negara mayoritas tersebut, maka yang termasuk ke dalam persyaratan untuk mendapatkan status hak kewarganegaraan adalah agama minoritas yang menghadapi persekusi dari ketiga negara tersebut (BBC 2019c). Begitu juga Menteri Dalam Negeri, Amit Shah yang mengatakan kelompok non-Muslim lah yang mengalami penganiayaan (BBC Verify Team 2024). Selain itu, Amit Shah juga mendeskripsikan imigran Muslim yang tinggal di India secara ilegal sebagai “rayap” dan terus mengulangi pernyataan tersebut (Agrawal 2019).

Ketika proses pengesahan amandemen ini di dalam parlemen, Amit Shah berfungsi menjadi pengawas supaya Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dapat segera disahkan. Ketika proses debat terjadi di parlemen Amit Shah, mengecam partai-partai oposisi karena "menyebarkan kebohongan" terhadap amandemen ini yang telah menciptakan anarki di negara tersebut (Langa 2020).

3.3 Hindutva sebagai Proyek Politik yang Direalisasikan dalam Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019

Menurut Robert S. Jansen, melihat mobilisasi populis adalah proyek politik berkelanjutan yang menggabungkan dua aspek, yaitu mobilisasi populis dan retorika populis. Mobilisasi populis ini menggerakkan sektor-sektor sosial yang biasanya terpinggirkan dan kurang diperhatikan ketika adanya aksi politik yang dilakukan secara terang-terangan dan kontroversial di depan publik. Sedangkan

retorika populis merupakan narasi-narasi yang digunakan aktor politik untuk mendeskripsikan perjuangan antara anti elit dengan orang biasa.

Berdasarkan dari kerangka teori yang dijelaskan oleh Jansen, Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dapat menjadi proyek politik di masa pemerintahan Narendra Modi. Dimana, Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 merupakan hasil dari mobilisasi populis secara pelan tapi pasti dalam jangka waktu lama yang telah dimulai oleh Narendra Modi dan BJP sejak masa berdirinya. Mobilisasi Hindutva semakin gencar dilakukan setelah kemenangan elektoral mereka bersama-sama di tahun 2014. Karena, kemenangan ini membuat BJP menjadi lebih leluasa untuk melakukan mobilisasi-mobilisasi Hindutva lainnya. Mulai dari lebih dapat memperhatikan hak-hak mayoritas Hindu, menghidupkan narasi-narasi dari ideologi Hindutva yang dibentuk melalui beberapa kebijakan, seperti *Love Jihad*, kampanye Ghar Wapsi, dan melakukan pengawasan promosi budaya Hindu, dalam hal ini adalah UU larangan penyembelihan sapi. Selain itu, juga melakukan penguatan dukungan yang sangat penting, yaitu di dalam parlemen legislatif. Proyek mobilisasi populis ini pelan-pelan dilakukan tetapi pasti, sehingga kemudian sampai ke parlemen legislatif sebagai kekuatan untuk jangka panjang.

Retorika populis juga dilakukan untuk membentuk skema berpikir tentang siapa warga asli India dan siapa yang bukan. Hal ini, dilakukan oleh Narendra Modi dengan mendeskripsikan dirinya menggunakan simbol-simbol dari ajaran Hindu, memberikan sentiminasi kepada orang-orang diluar dari Hindutva. Baik secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Amit Shah dengan mengatakan imigran Muslim sebagai rayap atau secara tersirat seperti Narendra Modi yang mengatakan tentang Islam Hindu. Nilai-nilai dari ajaran Hindutva juga disampaikan oleh

Narendra Modi untuk memberikan pandangan tentang ekonomi pembangunan India maju yang harus dikembalikan kejayaannya dari sejarah India. Retorika populis juga dilakukan di dalam Amandemen UU Kewarganegaraan India sebagai pertimbangan moral atas alasan mengapa tidak mengikutsertakan Islam dalam persyaratan untuk mendapatkan status hak kewarganegaraan India.

Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 ini menjadi strategi politik yang fleksibel untuk dilakukan demi mendapatkan dukungan publik. Dimana dapat semakin menghidupkan emosional para pendukung Hindutva atau para pendukung Narendra Modi dan BJP serta aliansinya dan legitimasi kekuasaannya. Hal ini, tentu saja dilakukan untuk dapat mengejar agenda politiknya, yaitu nasionalisme Hindu, menjadikan India sebagai negara bangs Hindu dan mengembalikan kejayaan Hindu di Asia Selatan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 menjadi solusi bagi India untuk mengatasi permasalahan imigran ilegal di negaranya. Akan tetapi, isinya tidak mengikutsertakan Islam sebagai salah satu agama yang bisa mendapatkan status hak kewarganegaraan India. Aksi protes dan pecahnya kerusuhan akhirnya terjadi, baik di kota pemerintahan pusat maupun di negara-negara bagian India. Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dianggap mendiskriminasi imigran ilegal yang beragama Islam di India yang belum mendapatkan kewarganegaraan India, dianggap sebagai strategi politik untuk meminggirkan populasi Muslim di India, dan agenda menyebarkan ideologi Hindutva dalam konstitusi India yang dilakukan oleh Narendra Modi dan BJP. Hal ini, dikarenakan visi BJP sejak pertama kali berdiri adalah membangun India dengan budaya Hindu dan membentuk India menjadi negara yang kuat serta memiliki rasa kesatuan. Pada penelitian ini penulis melakukan analisis Politik Populisme dalam Pembentukan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dengan menggunakan kerangka teori mobilisasi populis dari Robert S. Jansen. Teori mobilisasi populis menggambarkan mobilisasi populis sebagai sebuah proyek politik yang berkelanjutan dan fleksibel serta dilakukan untuk mengejar agenda aktor politik dengan tujuan mendapatkan dukungan politik. Keberhasilan teori mobilisasi populis dilihat dari gabungan antara mobilisasi rakyat dan retorika populis.

Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 telah mencerminkan keberhasilan dari mobilisasi populis dalam jangka panjang yang dilakukan Narendra Modi dan BJP melalui kebijakan-kebijakan domestik India, serta permainan retorika populis untuk memberikan gambaran kepada masyarakat India mengenai siapa yang asli warga India dan siapa yang bukan. Mobilisasi populis dan retorika populis ini semakin gencar dimainkan ketika 2014 menjadi kemenangan Narendra Modi dan BJP serta masuknya ideologi Hindutva sebagai angin baru yang segar dalam perpolitikan di India. Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 menjadi strategi yang mudah dilakukan Narendra Modi dan BJP untuk mendapatkan dukungan publik, melegitimasi kekuasaannya, dan mempercepat agenda nasionalisme Hindu mereka, menjadikan India sebagai negara besar dari bangsa Hindu.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan diatas, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini terkait politik populisme dalam pembentukan Amandemen UU Kewarganegaraan India 2019 dengan menggunakan teori mobilisasi politik dari Robert S. Jansen. Dengan adanya saran dan rekomendasi, penulis berharap untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis serupa tetapi lebih spesifik. Rekomendasinya adalah melakukan penelitian terkait politik populisme yang dilakukan oleh Narendra Modi melalui media sosial *Twitter* atau *NaMo App* dalam rentang tahun 2019-2024. Hal ini, dilakukan karena *Twitter* dan *NaMo App* menjadi aplikasi yang sering digunakan oleh Narendra

Modi. Tahun 2019-2024 dipilih karena merupakan periode kemenangan kedua Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Ravi. 2019. "It's Modi's India Now." *Foreign Policy*, 2019. <https://foreignpolicy.com/2019/05/23/modis-coming-back-to-power-but-hell-take-over-a-different-india-narendra-modi-bjp/>.
- Anand, Arun. 2020. "Amit Shah's Stand Reflects His Decisiveness. Most Indians Support CAA Lock, Stock and Barrel." *ThePrint*. 2020. <https://theprint.in/talk-point/amit-shah-caa-brinkmanship-stoking-more-trouble-or-are-there-ways-to-assuage-protesters/353053/>.
- Anuja, and Gyan Varma. 2019. "President Gives Assent to CAB, 5 States Refuse to Implement It." *Mint*. 2019. <https://www.livemint.com/politics/news/president-gives-assent-to-cab-5-states-refuse-to-implement-it-11576262342021.html>.
- Aulia, Luki. 2023. "'India' Atau 'Bharat', Mengapa India Ingin Ganti Nama Negara?" *Kompas.Id*. 2023. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/09/08/india-atau-bharat-mengapa-india-ingin-ganti-nama-negara>.
- Aygul, Aysenur, and Mobassera Jahan Fatima. 2022. "Examination of Indian Citizenship Amendment Act (CAA) in The Context of Hindu Nationalism, Islamophobia/Anti-Islam, and International Law." *Migration Research Foundation*. Ankara. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25149.13281>.
- Babar, Sabina. 2024. "Hindu and Hindutva Ideology in Indian Polity: Examining Modi's Administration." *Strategic Studies* 43 (2): 80–96. <https://doi.org/10.53532/ss.043.02.00301>.
- BBC. 2019a. "Citizenship Amendment Act: India PM Modi Appeals for Calm as Protests Grow." *BBC News*. 2019. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50805092>.
- . 2019b. "Citizenship Amendment Bill: 'Anti-Muslim' Law Challenged in India Court." *BBC News*. 2019. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50739593>.
- . 2019c. "Citizenship Amendment Bill: India's West Bengal Hit by Protests." *BBC News*. 2019. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50793529>.
- D'Souza, Shanthie Mariet. 2021. "Narendra Modi | Biography & Facts." *Britannica*. 2021. <https://www.britannica.com/biography/Narendra-Modi>.
- Damayanti, Angel, Verdinand Robertua, and Darynaufal Mulyaman. 2022. *Islamofobia Di Indo-Pasifik: Akar Permasalahan, Dampak Terhadap Keamanan, Dan Strategi Penanggulangan*. Jakarta: UKI Press.
- DW. 2022a. "Bagaimana Impian Negara Hindu Asingkan Minoritas Agama." 2022. <https://www.dw.com/id/bagaimana-impian-negara-hindu-asingkan-minoritas-agama/a-62791707>.
- . 2022b. "Pemerintah India Mau Nilai-Nilai Hindu Jadi Ideologi Negara." *DW*. 2022. <https://www.dw.com/id/pemerintah-india-mau-nilai-nilai-hindu-jadi-ideologi-negara/a-60856452>.
- Gosh, Deepshikha. 2019. "Protests at University in Lucknow, Cops Ask Students to Remain Inside." *NDTV*. 2019. <https://www.ndtv.com/india-news/massive-protest-stone-pelting-at-university-in-lucknow-hours-after-violence-in-jamia-amu-campuses-2149479>.

- HT Correspondent. 2019. "Citizenship Amendment Bill Gets Lok Sabha Nod, Rajya Sabha Test Next." *Hindustan Times*. 2019. <https://www.hindustantimes.com/india-news/citizenship-bill-that-excludes-muslims-gets-lok-sabha-nod-rajya-sabha-test-next/story-Xz7YvdmlIganmTRhIVtjcM.html>.
- Jansen, Robert S. 2011. "Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism." *Sociological Theory* 29 (2): 75–96. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2011.01388.x>.
- Kumar, Dr Statis. 2019. "Study of The 17th General Elections of Lok Sabha: Emergence of Bharatiya Janata Party (BJP) as A Single Largest Political Party with Majority." *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary* 04 (12): 256–60.
- Langa, Mahesh. 2020. "Opposition's Lies on Citizenship Amendment Act Have Led to Anarchy: Amit Shah." *The Hindu*. 2020. <https://www.thehindu.com/news/national/citizenship-amendment-act-oppositions-lies-have-led-to-anarchy-says-amit-shah/article30545529.ece>.
- Lestari, Atmani Anggit, M. Syaprin Zahidi, and Mohd. Agoes Aufiya. 2023. "Polarisasi Penguatan Nasionalisme Hindu Di India Dalam Kebijakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9 (1): 134–47. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2963>.
- Mahmudabad, Ali Khan. 2020. "Indian Muslims and the Anti-CAA Protests: From Marginalization Towards Exclusion." *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, no. 24/25, 0–18. <https://doi.org/10.4000/samaj.6701>.
- Mayilvaganan, M. 2019. "Illegal Migration and Strategic Challenges : A Case Study of Undocumented Migration from Bangladesh to India" 18 (4): 25–42. <https://doi.org/10.12724/ajss.51.2>.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nath, Damini, and Vijaita Singh. 2021. "After A Heated Debate, Rajya Sabha Clears Citizenship (Amendment) Bill." *The Hindu*. 2021. <https://www.thehindu.com/news/national/parliament-clears-citizenship-amendment-bill/article61608120.ece>.
- Outlook News Desk. 2024. "Explained: What Is Citizenship Amendment Act, Why Is It Controversial Along With Proposed NRC?" 2024. <https://www.outlookindia.com/national/explained-what-is-citizenship-amendment-act-why-is-it-controversial-along-with-proposed-nrc>.
- Outlook Web Desk. 2024. "UN Calls CAA 'Fundamentally Discriminatory In Nature.'" *Outlook*. 2024. <https://www.outlookindia.com/international/un-calls-cao-fundamentally-discriminatory-in-nature>.
- PTI. 2019. "Citizenship Amendment Bill: Federal US Commission Seeks Sanctions Against Home Minister Amit Shah." *Times of India*. 2019. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/citizenship-amendment-bill-federal-us-commission-seeks-sanctions-against-home-minister-amit-shah/articleshow/72449798.cms>.
- . 2024. "Mumbai Lawyers Take Out Rally in Support of CAA Outside High Court." 2024. <https://www.outlookindia.com/national/india-news-mumbai-lawyers-take-out-rally-in-support-of-cao-outside-high-court-news-346323>.

- Ramadani, R. Yahdi. 2020. "Diskriminasi Kaum Muslim Di India Menurut Konvensi Hak Asasi Manusia." *Inicio Legis* 1 (1): 1–14. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8823>.
- Rao, Raghvendra. 2022. "Di Balik Kebangkitan Musik Bertema Anti-Muslim Yang Kian Populer Di India." BBC Indonesia. 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjl5991xg36o>.
- Reuters. 2023. "Kerusuhan Berbau Agama Paksa Muslim India Tinggalkan Kotanya." ANTARA NEWS. 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3675561/kerusuhan-berbau-agama-paksa-muslim-india-tinggalkan-kotanya>.
- Robby, Hadza Min Fadhli. 2022. "India's Relations with Muslim Countries during the Implementation of CAA/NRC: India-Indonesia and India-Malaysia Relations" 5 (2): 156–77. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v5i2.879>.
- Rusmianti, Nur Madya. 2021. "Analisis Konflik Terhadap Penerapan Kebijakan The Citizenship Amendment Bill Di India Tahun 2019." *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 9 (2): 290–305.
- Saha, Punyajoy, Binny Mathew, Kiran Garimella, and Animesh Mukherjee. 2021. "Short Is the Road That Leads from Fear to Hate": Fear Speech in Indian Whatsapp Groups. *The Web Conference 2021 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2021*. Vol. 1. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3442381.3450137>.
- Singh, Gurharpal. 2019. "Hindu Nationalism in Power : Making Sense of Modi and the BJP-Led National Democratic Alliance Hindu Nationalism in Power : Making Sense of Modi and The." *Sikh Formations* 00 (0): 1–18. <https://doi.org/10.1080/17448727.2019.1630220>.
- Sreepada, Nihar. 2025. "Religious Nationalism: Narendra Modi's 2019 Election Victory Speech." *Religions* 16 (3). <https://doi.org/10.3390/rel16030349>.
- Srivastava, Nitin. 2019. "Bagaimana Perdana Menteri Narendra Modi Membuat Cemas Muslim Di India." BBC Indonesia. 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50756563>.
- Suastha, Riva Dessthanian. 2018. "Narendra Modi, Mantan Penjual Teh Di Stasiun Kini PM India." CNN Indonesia. 2018. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180530065631-106-302121/narendra-modi-mantan-penjual-teh-di-stasiun-kini-pm-india>.
- Swati Gupta, Omar Khan, dan Ahmer Khan. 2019. "Protests Spread Across India Over New Citizenship Law Which Excludes Muslims." CNN. 2019. <https://edition.cnn.com/2019/12/15/india/india-protests-assam-delhi-citizenship-intl-hnk>.
- T., Suchithra. 2020. "Hindutva and Hindu Nationalism." *Towards Excellence* 12 (5): 35–39. <https://doi.org/10.37867/te120505>.
- The Citizenship (Amendment) Bill 2019. 2019. "The Citizenship (Amendment) Bill, 2019."
- The Economic Times. 2019. "Anti-CAB Stir: People Defy Curfew, Police Open Fire as Assam." The Economic Times. 2019. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/anti-cab-protests-in-assam-police-opens-fire-on-protestors/articleshow/72487251.cms?from=mdr>.
- Times of India. 2019. "BJP Takes Out Rallies in West Bengal in Support of

- Citizenship Law.” Times of India. 2019.
<https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/bjp-takes-out-rallies-in-west-bengal-in-support-of-citizenship-law/articleshow/72841641.cms>.
- TNN. 2019. “Lok Sabha Passes Citizenship Bill 311-80 at Midnight, Amit Shah Says ‘NRC Is Coming.’” Times of India. 2019.
<https://timesofindia.indiatimes.com/india/lok-sabha-passes-citizenship-amendment-bill/articleshow/72448424.cms>.
- Waikar, Prashant. 2018. “An Analysis of Narendra Modi ’ s Political Discourse.” *Islamophobia Studies Journal* 4 (2): 161–80.
- Yilmaz, Ihsan, and Nicholas Morieson. 2022. “Civilizational Populism: Definition, Literature, Theory, and Practice.”